

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi Informasi menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi setiap organisasi. Hal ini dikarenakan perkembangan Teknologi Informasi sangat menjanjikan efisiensi proses, penyebaran informasi secara cepat, transparan dalam berbagai bidang (Feoh & Gunawan, 2022). Pada institusi pemerintahan, pemanfaatan Teknologi Informasi dan digitalisasi dalam meningkatkan pelayanan publik dikenal sebagai *e-government* (Rachmatullah & Purwani, n.d.). Pengembangan ini semakin meningkat terutama di masa pandemi, banyak kegiatan yang berlangsung secara fisik harus beralih menjadi kegiatan yang berlangsung secara digital. Pengembangan *e-government* terus dilakukan dengan menargetkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk mencapai sistem tersebut diperlukan peran aset tak berwujud seperti perangkat lunak (*software* komputer), lisensi, dll. (KSAP No.14 paragraf 7, 2021)

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.14 tentang akuntansi aset tak berwujud menerangkan definisi Aset Tak Berwujud (ATB) sebagai berikut: “aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau

digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual”. Perlakuan aset tak berwujud tidak dapat dipersamakan dengan aset-aset lainnya, sebagaimana definisi aset tak berwujud mensyaratkan bahwa suatu aset tak berwujud dapat diakui jika memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan. Selain itu adanya perbedaan jenis aset tak berwujud yang dimiliki pemerintah yaitu berdasarkan jenis sumber daya, berdasarkan cara perolehan, dan berdasarkan masa manfaat.

Dalam Buletin Teknis nomor 17 tentang akuntansi aset tak berwujud berbasis akrual bahwa kompleksitas suatu aset dapat diakui sebagai aset tak berwujud seringkali masih menjadi permasalahan yang dialami oleh beberapa kementerian dan lembaga (K/L) maupun pemerintahan daerah, seperti permasalahan pengidentifikasian dan pencatatan hasil kajian, pengidentifikasian dan pencatatan aset tak berwujud yang diperoleh dari dana bantuan penelitian instansi lain dan sharing dana penelitian bersama, penilaian dan pencatatan paten, serta pengidentifikasian dan pencatatan *software* komputer (KSAP, 2014). Permasalahan aset tak berwujud terkait dengan *software* komputer misalnya, Kebanyakan K/L ataupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) salah mengklasifikasikan *software* komputer yang melekat pada nilai Peralatan dan Mesin ataupun yang diklasifikasikan tersendiri sebagai aset tak berwujud. Kesalahan penyajian ini dapat mempengaruhi keakuratan laporan keuangan sehingga diperlukan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yakni PSAP Nomor 14 tentang akuntansi aset tak berwujud, Buletin Teknis nomor 17 tentang Akuntansi aset tak berwujud dan regulasi terkait. Selain

itu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan LKPP selama tahun 2019, 2020 dan 2021 masih terdapat permasalahan mengenai pengelolaan aset tak berwujud, antara lain adanya aset tak berwujud yang bersaldo minus, aset tak berwujud yang tidak dimanfaatkan dan pencatatan aset tak berwujud tidak tertib dan permasalahan signifikan lainnya.

Penelitian yang mengulas aset tak berwujud telah dilakukan dalam beberapa literatur sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, Kurnia Sari & Putri Maharani (2020) mengulas tentang implementasi aset tak berwujud pada BUMN yaitu PT.Telekomunikasi Indonesia. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kesesuaian dengan kriteria yang ada dalam PSAK 1 (2016) dan PSAK 19 (2015). Anugraini & Puryandani (2021) mengulas tentang implementasi penghapusan aset tetap dan aset tak berwujud studi kasus pada BPPKAD kabupaten Blora tahun 2019 dengan hasil kesimpulan bahwa penghapusan aset tetap dan aset tak berwujud telah sesuai dengan regulasi yang berlaku pada pemerintah Kabupaten Blora.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk meninjau perlakuan akuntansi atas aset tak berwujud berdasarkan PSAP 14 di lingkungan Pemerintah Pusat yaitu pada Pusat Informasi Pengawasan BPKP. Pusat Informasi Pengawasan BPKP atau sering disebut dengan singkatan Pusinfowas BPKP merupakan instansi Kantor Pusat di lingkungan BPKP yang memiliki tugas yaitu melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional melalui sistem informasi berbasis elektronik. Berdasarkan

LK BPKP tahun 2021, nilai buku aset tak berwujud BPKP per 31 des 2021 sebesar Rp11.232.748.867. Nilai tersebut memiliki persentase tertinggi dari jumlah aset lainnya yang dimiliki oleh BPKP yaitu sebesar 72,73%. Merujuk pada lampiran 6, sebesar Rp7.010.555.850 merupakan nilai aset tak berwujud yang dimiliki oleh Pusinfowas BPKP. Nilai tersebut merupakan 62,41% dari jumlah aset tak berwujud yang dimiliki oleh BPKP. Besarnya nilai aset tak berwujud yang dimiliki oleh pusinfowas BPKP sejalan dengan tugas Pusinfowas BPKP. Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan peninjauan atas aset tak berwujud pada Pusinfowas BPKP dan menuangkannya dalam karya tulis tugas akhir dengan judul “Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tak Berwujud Berdasarkan PSAP 14 Pada Pusinfowas BPKP”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi aset tak berwujud yang dimiliki oleh Pusinfowas BPKP?
2. Apakah aset tak berwujud yang dimiliki Pusinfowas BPKP telah memenuhi kriteria aset tak berwujud?
3. Apakah perlakuan akuntansi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan Pusinfowas BPKP telah sesuai dengan aturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai jenis aset tak berwujud yang terdapat pada Pusinfowas BPKP.
2. Memberikan informasi kesesuaian pemenuhan kriteria aset tak berwujud pada Pusinfowas BPKP.
3. Menjelaskan kesesuaian perlakuan akuntansi aset tak berwujud di Pusinfowas BPKP dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan ini mengambil objek penelitian pada Pusinfowas BPKP, batasan dalam ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada peninjauan akuntansi aset tak berwujud yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang dimiliki Pusinfowas BPKP T.A. 2021. Adapun yang menjadi dasar peninjauan yaitu laporan keuangan Pusinfowas BPKP T.A. 2021 disesuaikan dengan PSAP 14, Bultek 17 dan Regulasi terkait aset tak berwujud.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, berikut merupakan manfaat yang diharapkan dapat tercapai dengan adanya penulisan ini, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur dalam penulisan dimasa mendatang tentang perlakuan akuntansi aset tak berwujud yang diterapkan

oleh pemerintah pusat sebagaimana standar akuntansi pemerintah yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pusinfowas BPKP jika ditemukan ketidaksesuaian terkait perlakuan akuntansi aset tak berwujud dengan standar yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi gambaran umum penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya tulis ini. Bab ini meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan dan menguraikan sistematis penyajian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan teori-teori yang melandasi penulisan karya tulis yaitu menjelaskan definisi aset tak berwujud, klasifikasi aset tak berwujud, perlakuan akuntansi aset tak berwujud terkait pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait topik penulisan yaitu PSAP 14, Bultek 17 dan regulasi terkait. Landasan teori ini dijadikan kerangka dalam penyusunan pembahasan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian yaitu metode penelitian, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan. Bagian pertama menjelaskan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan

merencanakan sesi wawancara yang dilakukan dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring).

Bagian selanjutnya adalah gambaran umum untuk menjelaskan secara singkat Pusat Informasi Pengawasan BPKP sebagai objek penulisan. Penulis menerangkan struktur pengelola aset tak berwujud di lingkungan Pusinfowas BPKP. Selain pengenalan singkat, penulis juga menuangkan beberapa fakta terkait penerapan kebijakan akuntansi aset tak berwujud pada objek juga bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada Pusinfowas BPKP.

Bagian terakhir pada bab ini merupakan pembahasan hasil tinjauan atas perlakuan akuntansi aset tak berwujud pada objek.

Tinjauan tersebut meliputi.

- tinjauan klasifikasi aset tak berwujud;
- tinjauan kriteria aset tak berwujud;
- tinjauan perlakuan akuntansi aset tak berwujud berdasarkan pengakuan, pengukuran, penghentian, serta penyajian dan pengungkapan

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan atas pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya atas “Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tak Berwujud Berdasarkan PSAP 14 Pada Pusinfowas BPKP”. Simpulan tersebut juga menjawab tujuan penelitian dengan cara merangkum isi pembahasan.